

Analisis Peran Posyandu di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Balita

Ontran Sumantri Riyanto¹ Retno Mawarini Sukmariningsih² Anggraeni Endah Kusumaningrum³

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta¹

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah, Indonesia^{2,3}

Email: Ontran27@yahoo.co.id¹

Abstrak

Setiap anak dan balita memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, antara lain hak atas kesehatan, rasa aman, tumbuh kembang yang sehat, dan lingkungan yang baik. Selama situasi pandemi Covid-19, fasilitas pelayanan kesehatan membatasi pelayanannya karena mengutamakan penanganan pasien covid-19, sedangkan untuk pelayanan balita yaitu posyandu di masyarakat untuk sementara ditiadakan. Hal ini dikarenakan posyandu perlu melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan penularan covid-19. Selain itu juga posyandu memiliki peranan yang sangat penting di masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam mengubah perilaku dan lingkungan khususnya untuk pelayanan kesehatan bagi balita. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya tentang kajian yuridis peran Posyandu di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita. Hasil penelitian ini bahwa Posyandu memiliki peran yang baik di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita dan sudah berjalan. Kendala yang terjadi di posyandu pada masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak atas kesehatan pada balita disebabkan oleh faktor-faktor seperti jumlah kader, partisipasi masyarakat untuk menjadi kader, kondisi ekonomi kader yang menurun sehingga mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan fasilitas yang dimiliki di posyandu.

Kata Kunci: Posyandu, Hak kesehatan, Balita, Covid-19

Abstract

Every child and toddler has the same rights as adults, including the right to health, a sense of security, healthy growth and development, and a good environment. During the Covid-19 pandemic situation, health service facilities limited their services because they prioritized handling covid-19 patients, while for toddler services, namely posyandu in the community, it was temporarily suspended. This is because posyandu needs to make various efforts to prevent the transmission of covid-19. In addition, posyandu also has a very important role in the community in realizing community independence in maintaining health through empowerment and the active role of the community in changing behavior and the environment, especially for health services for toddlers. This research uses the approach method used, namely the sociological juridical approach. The research carried out is explanatory research. This study aims to obtain a relationship between one variable and another about the juridical study of the role of Posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights in toddlers. The results of this study are that Posyandu has a good role during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights for toddlers and is already running. The obstacles that occurred at the posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling the right to health in toddlers were caused by factors such as the number of cadres, community participation to become cadres, the declining economic condition of cadres so that they had to work to help the family economy and facilities owned at the posyandu.

Keywords: Posyandu, Right to health, Toddler, Covid-19



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu isu bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional di Indonesia. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan (Riset Kesehatan Dasar, 2018) tentunya dapat berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia yang sehat, memiliki intelektualitas dan kualitas yang baik di suatu negara (Ali et al., 2018). Pembangunan bidang kesehatan Indonesia adalah melaksanakan program Indonesia Sehat dimana memiliki misi dan tujuan untuk meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat dan status gizi pada balita (Afritayeni, 2017).

Tingkat pemenuhan pada status gizi di suatu negara merupakan salah satu indikator dalam menentukan tinggi rendahnya nilai tingkat kesehatan pada anak balita. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) menjelaskan bahwa terdapat dua penyebab dari permasalahan gizi buruk pada anak balita, pertama karena rendahnya asupan gizi yang terkandung pada makanan yang dikonsumsi balita dan yang kedua akibat tertularnya penyakit pada balita yang mengakibatkan infeksi (Jayani, 2021). Sehingga status gizi balita merupakan hal penting yang utama dalam indikator derajat tingkat kesehatan balita secara tidak langsung tentunya dan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya angka kematian pada balita (Permatasari et al., 2021).

Setiap balita mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa antara lain hak atas kesehatan, hak mendapatkan rasa aman, hak penghidupan yang layak, Hak memperoleh kehidupan yang layak dan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur bahwa salah satu cara untuk mencapai peningkatan tingkat kesejahteraan pada anak balita adalah setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program posyandu (Artanti & Meikawati, 2021). Posyandu adalah suatu penyelenggaraan layanan kesehatan yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat yang mana diselenggarakan oleh masyarakat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pembangunan kesehatan, dan juga memberikan kemudahan fasilitas kesehatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan khususnya untuk ibu dan balita.

Semenjak terjadinya wabah pandemi covid-19 (Riyanto & Panggabean, 2021) Posyandu juga menjadi garda terdepan agar ibu dan balita tidak tertular covid-19 dan berupaya memutus rantai penularan dan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan balita di masyarakat karena berada di setiap kelurahan. Di masa pandemi Covid-19, Posyandu juga telah melakukan berbagai penanganan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan membatasi kegiatan untuk menghindari terjadinya penularan. Posyandu memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam mengubah perilaku hidup menjadi lebih sehat dan lingkungan bersih khususnya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi balita (Anggraini & Agustin, 2020).

Posyandu juga melakukan perencanaan dalam antisipasi yang baik dan efektif dalam mempersiapkan jalan untuk transformasi sistem pelayanan kesehatan dan membuat sistem pelayanan kesehatan lebih siap untuk menghadapi wabah dan mengurangi potensi risiko penularan tersebut di masa depan. Proses adaptasi harus berorientasi pada penguatan ketahanan proses pelayanan dan peningkatan potensi skala kapasitas penanganan Covid-19 yang berkembang pesat, sambil menunggu kepastian akses yang aman terhadap pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas.

Tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan posyandu dalam pemberian layanan kesehatan garis depan perlu melakukan pengecekan suhu tubuh setiap orang yang datang ke posyandu dan mempersiapkan juga kapasitas tempat isolasi Covid-19 untuk semua pasien, termasuk juga menata ulang tempat atau lokasi dan mengumpulkan kelengkapan cadangan Alat Pelindung Diri (APD) dan persediaan perlengkapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang sesuai, seperti produk kebersihan tangan dan desinfektan untuk dekontaminasi lingkungan. Konsultasi dengan petugas kesehatan perlu dijadwalkan untuk menghindari keramaian di ruang tunggu jika praktik pelayanan kesehatan dilakukan. Ruang tunggu harus ditata ulang kembali dengan memperhatikan jaga jarak pasien dengan kader posyandu dan petugas kesehatan. Jumlah pengunjung dan jam berkunjung harus dibatasi. Apabila memungkinkan, untuk meminimalkan kontak yang tidak perlu antara pasien dan staf, fasilitas perlu mengatur ulang proses dan ruangan sehingga arus lalu lintas pengunjung dapat berjalan satu arah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang melakukan kajian dan membahas aspek-aspek yuridis dan sekaligus membahas aspek-aspek sosial yang terjadi di masyarakat yang meliputi gejala-gejala hukum tertentu. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatori (Ranisatuhu, 2013). Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya tentang kajian yuridis terhadap peran posyandu pada masa pandemi Covid-19 dalam melaksanakan pemenuhan hak kesehatan pada anak balita. Sedangkan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pakar dan obyek penelitian, selain itu mengumpulkan data dengan studi dokumentasi yang bersifat kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah atau pandemi (Direktorat Gizi Masyarakat et al., 2020), penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya diikuti dengan upaya pelaksanaan dan pencegahan penyebaran virus covid-19 di masyarakat melalui pembatasan sosial, antara lain dengan melakukan pembatasan keramaian, pembatasan perjalanan keluar negeri dan antar daerah, pelaksanaan isolasi bagi yang tertular, penundaan dan pembatalan kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan, melakukan penutupan beberapa fasilitas umum dan pengaturan pelayanan publik. Di banyak tempat, penghentian sementara layanan kesehatan tertentu juga dilakukan yang tentunya juga mempengaruhi peningkatan besar kebutuhan akan layanan kesehatan yang tidak terpenuhi antara lain posyandu.

Program pencegahan penularan virus corona di tempat layanan kesehatan di posyandu juga dilakukan dengan menghentikan sementara atau mengurangi jadwal kegiatan posyandu di suatu wilayah. Melakukan skrining yang lebih ketat dilakukan juga saat memberikan layanan di posyandu. Akibat hal ini berdampak pada turunannya layanan kesehatan kepada balita sehingga memerlukan kampanye tindak lanjut untuk mengejar ketinggalan, misalnya untuk imunisasi yang terlewat. Upaya pencegahan penularan covid-19 terhadap ibu dan anak balita dengan melakukan pembatasan pelayanan kesehatan di posyandu merupakan bentuk preventif. Karena di pelayanan posyandu juga menimbulkan keramaian dan berpotensi terjadinya penularan (Nurhaeda et al., 2022).

Pandemi Covid-19 terjadi di semua negara di dunia bukan hanya di Indonesia. Keadaan ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik dari segi kesehatan, ekonomi, pariwisata, perdagangan dan politik. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda untuk kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang diterapkan untuk membatasi penularan Covid-19, dan pendekatan mereka untuk melonggarkan tindakan ini juga bervariasi. Kebijakan yang membatasi pergerakan untuk menahan penularan dapat menciptakan hambatan akses ke perawatan kesehatan dan akan mempengaruhi peta jalan untuk mengembalikan layanan seperti sebelumnya. Di tengah pandemi Covid-19, proses upaya kesehatan masyarakat tetap dilakukan dengan skala prioritas. Situasi ini juga mempengaruhi pada jadwal dan prosedur pelayanan kesehatan di posyandu, puskesmas dan di fasilitas kesehatan lainnya termasuk pelayanan kesehatan dilakukan pihak swasta.

Di sisi lain sejumlah orang tua juga khawatir datang ke posyandu, misalnya untuk melakukan imunisasi balita dan tak sedikit petugas kesehatan yang ragu dalam menyelenggarakan pelayanan imunisasi di tengah pandemi Covid-19 (R. P. Sari & Utami, 2020). Posyandu akan terus memberikan pelayanan esensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan pada balita. Tentunya dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan dan prosedur yang terbaik, dengan memperhatikan aturan pencegahan penularan yakni Physical Distancing from Control (PPI) untuk memutus mata rantai penularan. Posyandu telah menerapkan langkah-langkah tegas seperti menerapkan prinsip PPI dan memastikan physical distancing, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 27 April 2020 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota No. 094/1737/BPD tentang Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Posyandu merupakan pelayanan kesehatan dasar dan juga merupakan pelaksanaan dari upaya mewujudkan hak kesehatan bagi anak balita (Soedirham, 2012). Setiap bayi berhak tumbuh dan berkembang di dalam kandungan sejak lahir. Bayi yang masih dalam kondisi sangat rentan harus dilindungi sehingga pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah bahwa setiap anak berhak untuk hidup, mendapatkan asupan makanan bergizi untuk tumbuh kembang dan mendapatkan kesehatan yang baik untuk hidup sehat (Saraswati, 2021). Peraturan ini bertujuan untuk menurunkan jumlah angka kematian pada ibu dan balita. Karena hak kesehatan adalah salah satu hak bawaan setiap manusia, dan sejak itu melekat pada setiap individu manusia dan pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia sebagai bentuk menghargai hak setiap manusia yang hidup.

Di sisi lain peran Posyandu di daerah-daerah sangat penting sebab membantu dan perpanjangan tangan dari puskesmas dalam upaya mewujudkan hak anak atas kesehatan. Hal ini memastikan bahwa anak-anak memiliki hak yang sama mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di Posyandu. Skrining gizi untuk anak di bawah usia 5 tahun merupakan indikator awal kondisi kesehatan seperti: Program tambahan di Posyandu dengan pemberian imunisasi, vitamin dan PMT. Pelayanan di Posyandu dapat membantu masyarakat mengejar kebutuhan kesehatan yang lebih baik untuk balita.

Menjaga kesehatan bayi dan balita tidak lepas dari memperhatikan akan pemenuhan gizi bayi, sehingga pemerintah selalu mengingatkan untuk melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif (ASI) melalui pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk Posyandu. Upaya menjaga kesehatan anak di bawah usia lima tahun harus dilakukan dengan baik yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi mendatang yang sehat, kuat, cerdas, unggul dan berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi. Oleh karena itu upaya menjaga kesehatan telah dilakukan semenjak bayi masih di dalam kandungan ibunya, saat lahir dan hingga anak berusia 18 tahun. Selain itu, melalui pemberian imunisasi bertujuan untuk menjaga kekebalan tubuh pada balita,

juga dilakukan upaya untuk menjaga kesehatan balita. Pemberian imunisasi lanjutan juga diberikan pada bayi usia 18 bulan dan dilakukan vaksinasi DPT/HB/Hib dan imunisasi campak pada anak usia 2 tahun (Fitriani et al., 2021). Memberikan vitamin tambahan perlu juga dilakukan pada balita untuk mempertahankan kondisi ketahanan tubuh pada bayi. Kapsul vitamin A diberikan setahun sekali untuk bayi di usia 6 bulan hingga 11 bulan dan pemberian vitamin A diberikan 2 kali setahun untuk anak usia 1 tahun sampai 5 tahun. Selain vitamin, diberikan juga asupan makanan pendamping ASI yang disebut makanan pendamping ASI (MP-ASI) mulai diberikan pada saat balita berusia 6 bulan hingga 2 tahun (A. A. Sari & Kumorojati, 2019).

Untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Posyandu memenuhi harapan masyarakat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman untuk mengintegrasikan pelayanan sosial dasar di Posyandu. Posyandu yang dibentuk di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan dalam hal memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi yang ada, kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi bayi, permasalahan yang terjadi dan juga kemampuan sumber daya untuk direkrut sebagai relawan atau kader posyandu yang ada di daerah tersebut. Kegiatan Posyandu meliputi antara lain proses pendaftaran pasien, melakukan penimbangan bayi, pencatatan perkembangan kesehatan bayi, memberikan pelayanan kesehatan, melakukan penyuluhan kesehatan ke pada ibu-ibu, pengetahuan akan penganekaragaman pangan yang sehat bagi balita dan edukasi untuk peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu Posyandu juga memberikan pembinaan langsung kepada ibu yang memiliki anak balita seperti:

1. Pembinaan gizi balita dan perkembangan kesehatan untuk ibu, bayi dan pada balita
2. Pengendalian penyebaran penyakit dan kesehatan lingkungan.
3. Melaksanakan pola hidup yang bersih dan sehat di keluarga.
4. Bina Keluarga Balita (BKB) untuk ibu hamil dan anak sejak usia 0 (nol) sampai dengan 5 tahun.
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk anak usia 0 sampai 6 tahun

Pembahasan

Dalam praktiknya, Posyandu yang sudah terintegrasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya memaksimalkan hak kesehatan anak di bawah usia lima tahun secara optimal dengan layanan kesehatan di posyandu. Untuk Posyandu yang belum terintegrasi dengan pelayanan kesehatan tingkat pratama, madya atau purnama, hak anak atas pelayanan kesehatan terpenuhi namun belum maksimal. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan (BAPERMASDES) adalah lembaga dari bagian lintas sektor dinas kesehatan yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana program posyandu dan melaksanakan rencana program Posyandu. Bapermades bekerja untuk meningkatkan kesehatan anak di bawah 5 tahun yaitu dengan adanya program posyandu yang terintegrasi, yang tertuang pada Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di posyandu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011.

Di Posyandu, terdapat kader posyandu yang dilatih oleh tenaga kesehatan untuk membantu dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak. kader adalah relawan yang direkrut dari masyarakat, yang tugasnya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan kesehatan dan menggerakkan masyarakat secara aktif untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan posyandu (Yolanda et al., 2021). Para kader posyandu memiliki peran dalam menentukan keberhasilan program dari Posyandu, BKB, PAUD dan Program Posyandu Terpadu yang terdiri dari Ibu Bayi yang merupakan ibu dari anak usia 0-5 tahun di suatu daerah tertentu

dandan bersedia mengikuti kegiatan posyandu (Tse et al., 2017). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak. Selama pandemi covid-19 peran kader posyandu sangat diperlukan untuk membantu memberikan edukasi di masyarakat (Sofianis & Febrina, 2021). Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala karena kondisi ekonomi keluarga para kader, kader kurang aktif sebab para kader harus bekerja mencari tambahan. Perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan tunjangan tambahan kepada kader posyandu secara mereka merupakan relawan yang membantu tenaga kesehatan di layanan posyandu.

Peran tenaga kesehatan dan kader posyandu adalah memberikan motivasi, edukasi kepada ibu-ibu yang memiliki balita untuk memeriksa tumbuh kembang anak dan mengikuti kegiatan atau program dari posyandu yang dilaksanakan setiap sebulan sekali, dengan cara seperti memberikan penghargaan kepada ibu-ibu bayi yang mengikuti posyandu delapan kali dalam setahun (Pranata et al., 2012). Orang tua harus selalu proaktif untuk membawa balitanya (Diharja et al., 2020). Ini merupakan upaya dari kader posyandu untuk meningkatkan kesehatan anak balita, terutama di lingkungan sekitar tempat tinggal kader.

Untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dan kemandirian para kader perlu diberikan pelatihan dan pembekalan kepada kader tentang kegiatan Posyandu, dan harus ada jadwal rutin untuk melakukan kegiatan Posyandu. Diharapkan para kader posyandu mampu menjelaskan fungsi dan manfaat posyandu kepada ibu-ibu sehingga masyarakat memahami akan kegiatan di posyandu tersebut. Kegiatan tersebut ternyata mendapat respon positif dari ibu-ibu yang memiliki anak kecil, dengan memberikan kesan ramah dan baik, serta kepastian pelayanan dilakukan secara rutin. Hal ini menginspirasi ibu-ibu untuk berpartisipasi dengan antusias di posyandu. Dengan demikian keberadaan posyandu sangat bermanfaat yaitu:

1. Masyarakat

Mendapatkan informasi lebih cepat dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang baik, terutama terkait kesehatan dan gizi sehingga penurunan Angka Kesehatan Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat ditekan semaksimal mungkin. Selain itu juga mendapatkan bantuan secara profesional untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Efisiensi dalam memperoleh pelayanan kesehatan terpadu dengan sektor terkait lainnya.

2. Kader posyandu dan Tokoh Masyarakat

Memperoleh informasi yang proaktif tentang upaya kesehatan terkait dengan penurunan Angka Kesehatan Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Dengan demikian dapat membantu masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan yang terkait dengan penurunan Angka Kesehatan Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

3. Puskesmas

Mengoptimalkan fungsi dari Puskesmas sebagai tempat pusat pembangunan yang berorientasi pada kesehatan, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama. Hal ini bisa lebih spesifik dalam membantu masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan tetapi juga tergantung pada kondisi setempat. Selain itu juga dapat dilakukan Peningkatan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya melalui pemberian layanan kesehatan secara terintegrasi.

KESIMPULAN

Peran pos pelayanan terpadu atau disebut dengan posyandu di masyarakat telah berjalan sesuai dengan protokol kesehatan sehingga upaya pemenuhan hak kesehatan pada ibu dan balita di masa pandemi Covid-19 tetap menjadi prioritas, meskipun dalam pelaksanaannya

masih terdapat beberapa ibu-ibu yang belum aktif datang membawa bayinya ke posyandu. Hal ini terjadi karena kekhawatiran orang tua bahwa anaknya berpotensi tertular. Bagi posyandu yang pelaksanaannya belum terintegrasi belum secara penuh melakukan layanan kesehatan karena berbagai faktor yaitu kondisi wilayah yang luas, kader yang kurang aktif, keterlibatan aktif pada ibu yang memiliki balita, tingkat pendidikan kader dan ibu balita dan sebagainya. Kendala yang dialami posyandu di masa pandemi Covid-19 dalam upaya untuk pemenuhan hak kesehatan pada balita disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jumlah kader yang sedikit, kaderisasi yang rendah dan kurangnya minat partisipasi masyarakat untuk menjadi kader posyandu. Selain itu juga terdapat tumpang tindih tugas yang dilakukan oleh kader dan juga masalah ekonomi karena sebagai kader posyandu bekerja secara sosial, sehingga banyak ibu lebih memilih mencari nafkah terutama pada masa pandemi Covid-19 dimana terjadi penurunan kondisi ekonomi keluarga dan di semua masyarakat termasuk kondisi ekonomi para kader. Selain itu perlu adanya peningkatan pengetahuan setiap kader di posyandu sehingga perlu mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di Puskesmas dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas di posyandu terkait kesehatan dan gizi dasar pada balita selama pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Afritayeni, A. (2017). Pola Pemberian Makan Pada Balita Gizi Buruk Di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Endurance*. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i1.1598>
- Ali, P. bahjuri, Siahaan, renova gloria montesori, Solikha, dewi amila, & Wikanestri, I. (2018). Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskemas. In *Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat*.
- Anggraini, Y., & Agustin, K. (2020). Efektivitas Pengetahuan Orangtua Batita terhadap Ketepatan Imunisasi Dasar dan Booster pada Masa Pandemi Covid-19 di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu. *Journal of Maternal*, 14(2).
- Artanti, S., & Meikawati, P. R. (2021). Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Balita pada Masa Pandemi Covid-19 sebagai Upaya Pemenuhan Hak Balita sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019. *Jurnal Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan*, 8(2). <https://doi.org/10.37402/jurbidhip.vol8.iss2.150>
- Diharja, N. U., Syamsiah, S., & Choirunnisa, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Kunjungan Imunisasi Di Posyandu Desa Tanjungwangi Kecamatan Cijambe Tahun 2020. *Asian Research of Midwifery Basic Science Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.37160/arimbi.v1i1.587>
- Direktorat Gizi Masyarakat, PERSAGI, & AsDI. (2020). Panduan Pelayanan Gizi dan Dietetik di Rumah Sakit Darurat dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Buku Panduan*.
- Fitriani, D., Fahrani, M., Herdiani, T. N., Sari, R. M., Ningsih, D. A., & Yulidar, S. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Lanjutan Campak Rubella Pada Balita Usia 18 Bulan Sampai 2 Tahun. *Ahmar Metastasis Health Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.53770/amhj.v1i1.1>
- Jayani, D. H. (2021). Sebanyak 45,4 Juta Balita di Dunia Menderita Kekurangan Gizi Akut. *Data Books*.
- Nurhaeda, N., Elfina, E., & Rini, P. (2022). Implementasi Posyandu “Balita Sehat” di Masa Pandemi Covid-19. *Media Publikasi Penelitian Kebidanan*, 3(2). <https://doi.org/10.55771/mppk.v3i2.37>
- Permatasari, T. A. E., Turrahmi, H., & Illavina, I. (2021). Edukasi Gizi Seimbang bagi Kader

- Posyandu pada Masa Pandemi Covid-19 sebagai Pencegahan Balita Stunting di Kabupaten Bogor. *AS-SYIFA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.24853/assyifa.1.2.67-78>
- Pranata, S., Pratiwi, N., & Rahanto, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan, Gambaran Peran Kader Posyandu Dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Di Kota Manado Dan Palangkaraya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. <https://doi.org/10.22435/bpsk.v14i2Apr.2321>
- Ranisatuhu, M. (2013). Pengaruh Kualitas Komunikasi Ibu-Penyuluh ASI dan Tingkat Pendidikan Ibu Terhadap Tingkat Pengetahuan ASI Eksklusif. *Interaksi Online*, Vol 1, No 1: Januari 2013.
- Riset Kesehatan Dasar. (2018). Riset Kesehatan Dasar 2018. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Riyanto, O. S., & Panggabean, H. W. (2021). Tantangan Bagi Dokter Atas Ketidakjujuran Pasien dalam Memberikan Keterangan Di Masa Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2987–2998. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3112>
- Saraswati, D. (2021). Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Pada Masa Covid 19 Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 17(1).
- Sari, A. A., & Kumorojati, R. (2019). Hubungan Pemberian Asupan Makanan Pendamping Asi (MPASI) Dengan Pertumbuhan Bayi Atau Anak Usia 6-24 Bulan. *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional*, 4(2). <https://doi.org/10.37341/jkkt.v4i2.120>
- Sari, R. P., & Utami, U. (2020). Studi Analisis Tingkat Kecemasan Dengan Kepatuhan Kunjungan Posyandu Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Maternal*, 4(2).
- Soedirham, O. (2012). Integrated Services Post (Posyandu) as Sociocultural Approach for Primary Health Care Issue. *Kesmas: National Public Health Journal*, 7(5). <https://doi.org/10.21109/kesmas.v7i5.40>
- Sofianis, N., & Febrina, R. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Posyandu Terkait Kesadaran Hidup Sehat Pada Masa Pandemi. *Jurnal Trias Politika*, 5(1).
- Tse, A. D. P., Suprojo, A., & Adiwidjaja, I. (2017). Peran Kader Posyandu Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*.
- Yolanda, F., Hanum, S. H., & Nopianti, H. (2021). Peran Kader Kesehatan Dalam Mengimplementasi Program Posyandu Balita Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Posyandu Garuda Kelurahan Tanjung Enim). *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 4(36).